

Judul : Pesan Ke PJ Gubernur Sulsel : Hindari Kegaduhan Ditahun Politik
Tanggal : Rabu, 18 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Pesan Ke Pj Gubernur Sulsel

Hindari Kegaduhan Di Tahun Politik

KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpesan agar para Penjabat (Pj) Kepala Daerah hendaknya menghindari kebijakan kontroversi untuk menghindari kegaduhan di tahun politik. Menurutnya, ini penting untuk memastikan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 berjalan lancar dan damai.

Pesan bos MPR ini merespons munculnya kegaduhan di masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dipicu pernyataan dan kebijakan yang kontroversi dari Pj Gubernur Sulsel Bahtiar. Di antaranya, Surat Edaran bagi Pemerintah Desa untuk mengalokasikan 40 persen dana desa mendukung pengembangan kawasan budi daya pisang pada

lahan tidur seluas 2 juta hektare. Kegaduhan lainnya, pernyataan bahwa Pemprov Sulsel sudah bangkrut dan terancam tutup karena memiliki utang sebesar Rp 1,5 triliun.

"Jangan buat kegaduhan. Ingat kita sudah masuk tahun politik dan kita butuh situasi kondusif," tegas Bamsoet, kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada para Bupati se-Sulsel terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Isinya, menginstruksikan Pemerintah Desa memfasilitasi pengalokasian masing-masing sebesar 40 persen pagu anggaran dari dana desa tahun 2024.

Dana itu untuk mendukung pemanfaatan lahan tidur sekitar 2 juta hektare untuk pengembangan budi daya pisang, dalam program ketahanan pangan di desa dengan target 500 ribu hektare yang tersebar di Provinsi Sulsel.

Tidak sampai di situ, Pj Gubernur Sulsel ini kembali menghadirkan polemik di Sulsel menyusul pernyataannya bahwa keuangan Pemprov Sulsel bangkrut. Hal ini didasari adanya defisit APBD senilai Rp 1,5 triliun.

Defisit terjadi karena perencanaan keuangan yang keliru, sehingga Sulsel saat ini mengalami kebangkrutan

Kementerian Keuangan ke-

mudian merespons soal defisit keuangan dan memastikan bahwa pernyataan Pj Gubernur Sulsel tidaklah tepat.

"Masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang). Mengingat anggaran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, untuk pengelolaan dana desa memang terdapat beberapa poin yang

satunya mandatory Pemerintah. Antara lain, untuk program pemulihan ekonomi nasional, mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional, program mitigasi bencana dan penanggulangan bencana alam dan lainnya.

Untuk program ketahanan pangan ini, masuk dalam kategori program Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Kalau tidak salah, itu batas minimumnya 20 persen (dana desa) penggunaannya untuk program ketahanan pangan nasional," kata Andi Iwan saat dihubungi, kemarin.

Namun dia menegaskan, penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa didasarkan

melalui menu-menu isian yang telah ditetapkan dan disajikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Karena itu, dia menilai kurang tepat jika Pj Gubernur Sulsel kemudian mengeluarkan Surat Edaran yang meminta para bupati untuk mengalokasikan 40 persen anggaran dan dana desa tahun 2024.

"Memang itu tidak melanggar regulasi, namun kurang tepat kalau diwajibkan seperti itu. Karena penggunaan dana desa harus melalui musyawarah desa. Aspirasi masyarakat desa sepatinya kemudian dibicarakan dan diputuskan oleh masyarakat desa

itu sendiri untuk penggunaan dana desanya," katanya.

Dia mengingatkan, tidak semua karakter wilayah dan masyarakat di pedesaan itu pas untuk ditanami pisang. Walaupun mungkin budi daya pisang ini memiliki dampak ekonomi bagi desa-desa tertentu, sehingga bisa saja diarahkan lantaran Pemprov Sulsel telah memiliki marketnya.

"Tapi jangan lupa, prinsipnya harus tetap melihat kondisi dan situasi desa masing-masing karena ini pasti tidak bisa dipukul rata. Masing-masing desa tentu punya komoditi (andalan), program kerja dan aspirasi masyarakat yang kira-kira harus tetap berjalan," katanya. ■ KAL